



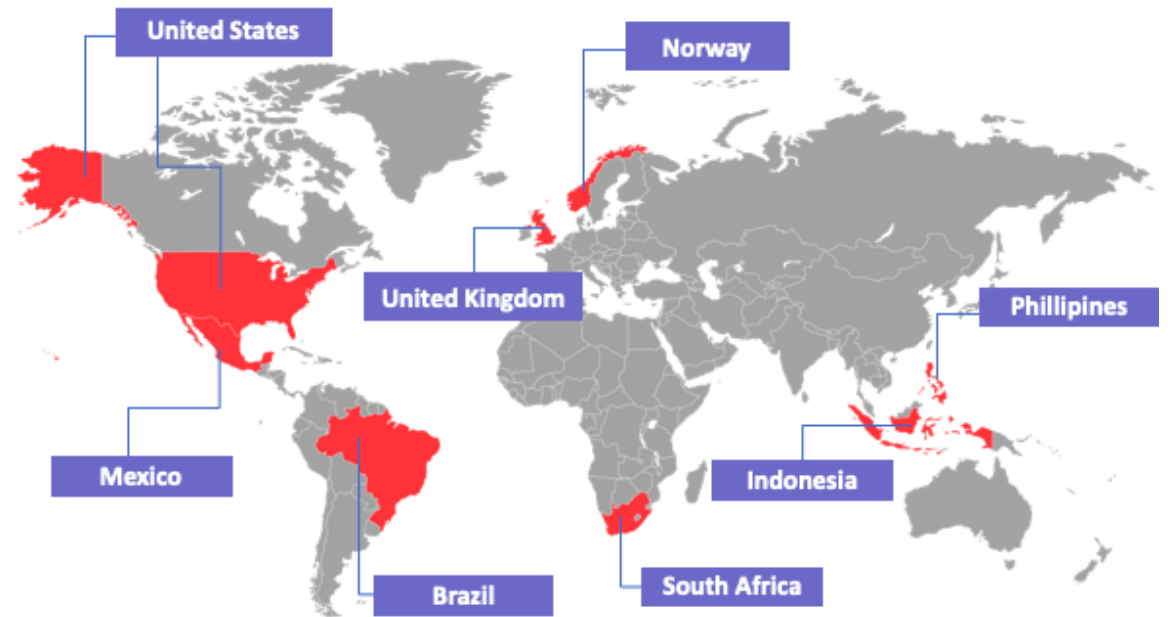
Open Parliament Indonesia (OPI) National Action Plan (NAP)

Latar Belakang Open Parliament Indonesia

Open Parliament Indonesia (OPI) merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong untuk mewujudkan parlemen yang lebih **modern** dan terbuka berdasarkan nilai-nilai **transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusif**. OPI selaras dengan inisiatif *Open Government Partnership (OGP)* dimana Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara pendirinya

Open Government Partnership merupakan gerakan multilateral yang berdiri semenjak 2011 dan saat ini beranggotakan 78 negara berkomitmen untuk mendorong keterbukaan di seluruh dunia.

Negara Inisiator OGP



Timeline OPI

Inisiatif **Open Parliament** diumumkan oleh Inter **Parliamentary Union (IPU)** pada 15 Desember tahun 2012.



2015

Awal bulan **Juli 2018** Parlemen Indonesia memperkuat inisiatif ini melalui **KTT Global Open Government Partnership (OGP)** di **Tbilisi Georgia**. Wakil Ketua DPR secara tegas mendukung inisiatif **Open Parliament Indonesia**.



Agustus
2018



2018-2020

Desember 2012

Juli 2018

Parlemen Terbuka Indonesia sejalan dengan inisiatif **“Parlemen Modern” DPR RI** yang telah mulai diterapkan pada **2015-2019**.



Parlemen Indonesia mendeklarasikan **Open Parliament Indonesia** atau **Parlemen Terbuka Indonesia** pada **Agustus 2018** dengan **National Action Plan (NAP) Open Parliament Indonesia (OPI)** pertamanya pada 2018-2020.

Implementasi dan **Monitoring & Evaluasi NAP OPI 2018-2020**



Landasan Hukum Open Parliament Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F tentang hak atas informasi

UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 telah ditetapkan bahwa “...*pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara akuntabel dan terbuka...*”

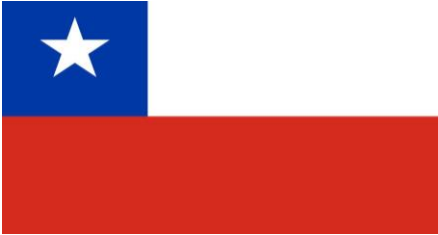
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang **Keterbukaan Informasi Publik**

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang **MPR, DPR, DPD dan DPRD** yang mengatur mengenai tata kerja parlemen. Termasuk di dalamnya tata kerja transparansi.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI tentang keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.



Beberapa Praktik Baik Open Parliament Chile



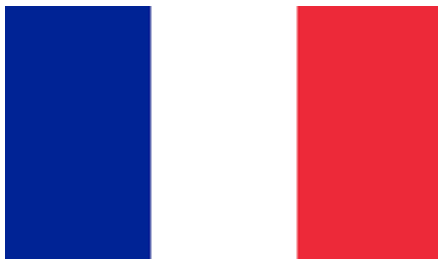
The Bicameral Group on Transparency of the Congress di Chile melihat bahwa partisipasi masyarakat di Parlemen masih sangat terbatas. Melalui Open Parliament Action Plan, mereka menetapkan sebuah standar partisipasi yang lebih terbuka, transparan, sekaligus digunakan untuk mendukung E- Platform dan Virtual Congress untuk partisipasi yang lebih luas.

Paraguay



Paraguay menggunakan Open Parliament Action Plan untuk membentuk kanal-kanal interaksi antara public dan parlemen yang user friendly. Kanal ini diutamakan agar masyarakat bias memantau proses legislasi di Parlemen. <http://www.senado.gov.py/index.php/menu-contenido/listado-de-categoria-contenido/222-categoria-tablero-control>

Perancis



Perancis yang melalui Open Parliament Action Plan yang membuka berbagai data keparlemenan, termasuk data anggota parlemennya, daftar kepentingan, dokumen legislasi, hasil voting dan juga menyiapkan portal open data agar publik dapat mengakses untuk kepentingan apapun baik aspirasi maupun akademis



Tugas OPI

Berdasarkan SK Pembentukan Tim OPI, Tim ini memiliki tiga tugas mendasar, yakni:

1. Merumuskan kebijakan-kebijakan DPR RI untuk pelaksanaan OPI NAP,
2. Merumuskan inovasi-inovasi untuk peningkatan transparansi dan keterlibatan publik di DPR RI
3. Mewakili DPR RI dalam interaksi dan kerja sama internasional yang terkait isu-isu keterbukaan informasi publik termasuk dengan Organisasi Internasional.



Urgensi Parlemen Indonesia Perlu

Terbuka

Peningkatan Akses Informasi

1. Menurut **Lembaga Survei Indonesia** tahun, kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap DPR RI masih rendah. sebanyak **45% masyarakat tidak percaya terhadap DPR RI** di tahun 2019.
2. Peringkat Keterbukaan Informasi DPR RI berdasarkan penilaian **Komisi Informasi Pusat (KIP)** pada tahun 2019 masih "**Menuju Informatif**".

Ke depan berbagai inisiatif bias dihasilkan termasuk integrasi penggunaan Teknologi Informasi ke dalam satu payung besar OPI ini. Komitmen tentang penyusunan Road Map Keterbukaan Parlemen perlu pula untuk menggarisbawahi integrasi Teknologi Informasi ini.

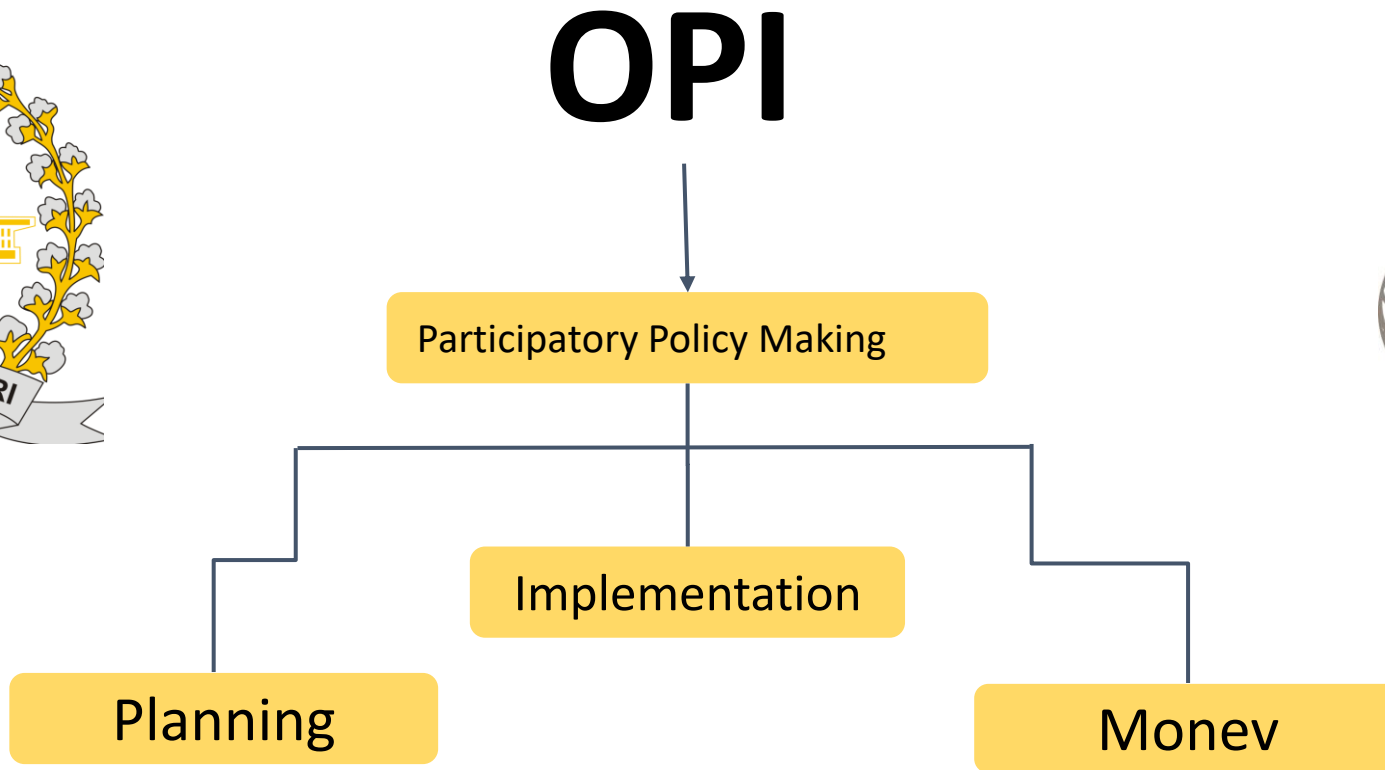
Permasalahan Infrastruktur Teknologi

1. Beberapa Aplikasi masih ada yang dikembangkan Sendiri oleh unit di luar BDTI
2. Hampir Setiap Satker membutuhkan system yang berbentuk Aplikasi Mobile
3. Website DPR masih susah dipahami Publik
4. Integrasi data antara eksternal dan internal DPR belum murni terintegrasi semua, masih ekspor-impor file.
5. Bagian repository mengalami kesulitan mengambil data dan bagian-bagian terkait
6. Semua system sudah terintegrasi secara database tapi belum interoperabilitas.
7. Permintaan mengembangkan aplikasi belum bisa semuanya terpenuhi.
8. BDTI belum mengetahui prioritas proyek yang harus didahulukan

Sumber: Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK)



Stakeholder Open Parliament Indonesia



**WESTMINSTER
FOUNDATION FOR
DEMOCRACY**



PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia



Rencana Open Parliament Indonesia

1. **Penyelesaian Pencapaian Milestone, terutama pada;**
 - a. Pelayanan partisipasi (komitmen 2)
 - b. Roadmap (Komitmen 4)
 - c. Pembentukan Sekretariat OPI (Komitmen 5)
2. **Monitoring dan Evaluasi NAP OPI periode 2018-2020**
3. **Penyusunan Laporan Monev untuk Repositori Online dan Se Assessment Report (SAR) kepada OGP.**
4. **Penyusunan NAP OPI periode 2020-2022**
5. Pembentukan **Multi Stakeholder Forum (MSF) OPI** yang melibatkan Anggota, AKD dan CSO dalam mengembangkan proses Ko-kreasi antara DPR dan masyarakat.
6. Penyusunan Mekanisme atau **SOP kerja Open Parliament Indonesia** dalam melaksanakan tugas terkait NAP, engageme pada stakeholder-stakeholder terkait serta diseminasi terkait Open Parliament Indonesia.





Terima Kasih